



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Maret 2021

Halaman: 5

► APBD 2021

Refocusing Anggaran Masih Dikaji

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masih mengkaji recokusing atau relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan Kementerian Keuangan. Sebab Pemkot sudah mengantisipasi anggaran penanganan pandemi.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan postur anggaran dalam APBD 2021 sudah mengakomodasi penanganan pandemi Covid-19 melalui sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sejumlah kegiatan di OPD sejak awal kami sudah mengantisipasi untuk merespons terhadap pandemi," kata Heroe, di sela-sela meninjau vaksinasi Covid-19 massa di Benteng Vredenburg, Selasa (2/3).

Karena itu pihaknya masih mengkaji terkait dengan adanya Surat Edaran Kementerian Keuangan untuk refocusing anggaran. "Ini kami kaji apakah perlu refocusing atau tidak. Apakah anggaran mampu respons apa tidak, APBD kami sudah merespons pandemi kan gitu.

Kegiatan reguler itu sudah dialokasikan untuk pandemi," ucap Heroe.

Heroe juga menyebut Pemkot juga sudah mengalokasikan Dana Tidak Terduga (DIT) sebesar Rp13 miliar untuk mengantisipasi ketika kegiatan penanganan pandemi Covid-19 masih belum mencukupi.

Sejauh ini diakuinya belum ada dampak signifikan terhadap program pembangunan akibat adanya refocusing anggaran karena anggaran penanganan pandemi. Pos anggaran kesehatan dan pemulihan ekonomi sudah terakomodasi. "Konstruksi APBD 2021 sudah cukup

fokus dalam penanganan Covid-19. Mitra pemerintah juga terlibat agar kebijakan yang diambil tepat," katanya.

Merujuk Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/ PK/2021 terkait dengan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah terdapat sejumlah refocusing, terutama berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Refocusing tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Khusus DAU minimal 8%. Sementara DID minimal 30%. Adapun DAK fisi sebisanya mungkin memanfaatkan tenaga lokal dan juga bahan baku lokal. (Ujar Hasanudin)

Nilai Berita	Sifat	Tinda
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk I
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk I

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005